

MENYINGKAPKAN ASUMSI PRAGMATISME DI BALIK KEBIJAKAN PUBLIK

Anastasia Jessica Adinda S.
UNIKA Widya Mandala Surabaya
anastasiajessica89@gmail.com

Abstrak

Kesesuaian antara kebijakan publik dengan orientasi untuk mencapai kebaikan umum adalah suatu hal yang perlu senantiasa diupayakan. Hal ini terkait dengan relasi antara pragmatisme dan kebijakan publik itu sendiri. Namun penerapan cara pandang pragmatis tersebut dalam kebijakan publik sering kali terlepas dari kepentingan publik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bidang filsafat yang berusaha mengkaji asumsi-asumsi pragmatisme dalam kebijakan publik dengan menggunakan perspektif epistemologi pragmatisme awal seperti pemikiran dari Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey. Hasil yang dicapai adalah: (1) pragmatisme dalam bidang ilmu sosial awalnya adalah suatu paham yang mengedepankan penerapan ilmu dalam permasalahan-permasalahan sosial secara konkret, (2) Penerapan cara pandang pragmatis dalam kebijakan publik lambat laun terlepas dari kepentingan publik terjebak dalam situasi dehumanisasi, (3) konsekuensi logis dari diabsolutkannya konsekuensi praktis dan kegunaan yang mengakibatkan pragmatisme alih-alih membawa pada kebaikan umum, malahan dalam kondisi tersebut manusia menjadi sarana untuk mencapai kepentingan penumpukan modal, atau sarana untuk mencapai kepentingan segelintir golongan

Kata Kunci: Pragmatisme, Kebijakan Publik, Kepentingan Publik

Pendahuluan

Relasi antara pragmatisme¹ dan kebijakan publik dapat kita temukan dalam tiga dimensi: (1) proses pembentukan kebijakan publik; (2) produk-produk kebijakan publik; (3) kajian/evaluasi atas kebijakan publik (Peirce,. Pertama, salah satu prinsip yang harus ada dalam proses pembentukan kebijakan publik ialah akuntabilitas. Akuntabilitas menekankan ciri dapat dipertanggungjawabkan,

¹ Pragmatisme berasal dari kata Pragmatikos (Bhs. Yunani) yang berarti keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan terlaksananya tujuan tertentu manusia. Pragmatisme dimengerti sebagai teori yang menyatakan bahwa makna dari konsep terletak hanya pada kemungkinannya untuk dibawa sebagai tindakan dalam kehidupan. (Charles Sanders Peirce, "What Pragmatism is?" dalam *The Monist* (vol 15, no 2), April 1905, 412 (digital version))

dalam arti memiliki kesesuaian dengan realitas empiris/didasarkan atas fakta-fakta dan berorientasi pada pemecahan persoalan. Hal ini bisa dilihat sebagai pengaruh dari ide-ide pragmatisme. Kedua, produk-produk kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun internasional mengafirmasi warisan epistemologi pragmatisme yang menyatakan suatu pernyataan/gagasan itu benar sejauh menghasilkan konsekuensi praktikal, dapat mengubah tindakan dan bisa memecahkan persoalan. Contoh penerapan prinsip pragmatisme dalam kebijakan publik dapat dilihat pada kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance policy*) dari Donald Trump yang melakukan administrasi pemisahan keluarga bagi mereka yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat (April 2018). Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka guna menghalangi imigrasi ke Amerika Serikat. Orang tua mereka dikirim ke penjara dan anak-anak ditempatkan di penampungan. Sebanyak hampir 3000 anak dipisahkan dari orang tua mereka. Dari kebijakan publik ini, warisan pragmatisme yang berorientasi pada pemecahan persoalan diterapkan tanpa memperhatikan aspek-aspek lain seperti kemanusiaan, kesehatan fisik dan psikis, hilangnya integritas diri, dll. Contoh lain, di Indonesia, kebijakan publik terkait dengan perlindungan terhadap perempuan, juga kerap kali bersifat sangat pragmatis, misalnya, untuk mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap perempuan maka diberlakukan jam malam khusus perempuan (perda Kota Tangerang, instruksi Gubernur Aceh), akibatnya perempuan yang bekerja dengan shift malam terhambat pekerjaannya; atau larangan mengenakan busana tertentu misalnya celana jeans ketat (perda syariah Aceh). Kebijakan publik yang demikian justru semakin menindas korban, sementara pandangan seksis (merendahkan manusia berdasar jenis kelamin) di masyarakat dibiarkan meliar tanpa upaya dari pemerintah untuk mengubahnya. Kebijakan publik yang demikian pragmatis juga ditemukan dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, agraria, dst. Ketiga, dalam evaluasi/ kajian atas kebijakan public. Eulau (1973) mendesak agar term ‘analisis kebijakan’ (*policy analysis*) diganti dengan term ‘pragmatikal kebijakan’ (*policy pragmatics*). Hal ini karena kajian kebijakan publik berorientasi pada persoalan (*problem-oriented*), menggunakan pendekatan

kontekstual, memiliki sikap fleksibel terhadap pilihan metode analisis dan berusaha untuk memadukan antara desain kebijakan dengan deskripsi empiris dan proyeksi kecenderungan perilaku masyarakat. Semua sifat-sifat ini diidentifikasi sebagai warisan-warisan pragmatisme².

Tulisan ini menyelidiki asumsi-asumsi pragmatisme di balik kebijakan publik. Terutama akan diteliti pengaruh epistemologi pragmatisme awal (Charles Sanders Peirce, William James dan John Dewey) pada analisis persoalan, analisis keputusan dan analisis implementasi dalam Kebijakan Publik. Dugaan yang penulis ajukan ialah ada jurang antara maksud pemikiran pragmatisme dan penerapan pragmatisme dalam kebijakan publik. Metode pragmatis pada mulanya digunakan untuk mendorong ilmu sosial agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial konkrit sehingga membawa pada kebaikan umum, namun justru produk-produk yang dihasilkan menjauh dari keadaan yang lebih manusiawi.

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Dasar Pragmatisme

a. Charles Sanders Peirce : Metode Klarifikasi Gagasan

“I understand pragmatism to be a method of ascertaining the meanings...”³

Usaha Pragmatisme Peirce bertujuan untuk menemukan metode untuk mencapai tingkat kejelasan makna yang lebih tinggi daripada yang ada dalam logika.⁴ Menurut Peirce, ada tiga tingkatan kejelasan makna yaitu: kesamaan tak terkatakan (*tacit familiarity*), definisi abstrak dan klarifikasi pragmatik sebagai tingkatan makna yang paling jelas. Pertama, *Tacit Familiarity*, untuk membuat ide menjadi jelas, kita membutuhkan beberapa penerjemahan dalam tanda. Hal

² Timothy V. Kaufman Osborn, “Pragmatism, Policy Science, and the State”, *American Journal of Political Science*, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1985), 828.

³ Charles Sanders Peirce dalam Vincent M. Colapietro, “Charles Sanders Peirce” dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 22.

⁴ Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”, dalam *Popular Science Monthly*, 12 January 1878, digital version, 1.

ini mengasumsikan adanya sebuah kesamaan erat pengertian dengan sebuah tanda. Tindakan kita berasal dari kemampuan kita untuk menyatakan dan menginterpretasi dalam situasi yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya kita menggunakan term real/nyata, tanpa bisa mendefinisikannya secara abstrak. Kedua, Definisi Abstrak. Untuk kepentingan kejelasan gagasan, dibutuhkan penerjemahan *tacit familiarity* ke definisi eksplisit. Kembali ke contoh tadi, menjelaskan term real, dapat dengan menyebutkan perbedaan antara real dan fiktif lalu sampai pada definisi: yang real adalah yang memiliki status dan sifat yang terlepas dari segala yang dibuat manusia mengenainya. Ketiga, Klarifikasi pragmatic. Kita harus waspada dengan tipuan definisi abstrak. Bagi Peirce, klarifikasi konseptual dengan definisi abstrak saja belum cukup untuk tujuan penyelidikan eksperimental. Menerjemahkan konsep ke konsep lain saja belum memadai untuk mencapai kejelasan. Hal yang paling diperlukan adalah menerjemahkan konsep dalam *habits of conducts* (kebiasaan tindakan).⁵

Bagi Peirce, tujuan akhir dari berpikir ialah untuk menghasilkan *habits of conduct*. Pertama-tama motivasi dari berpikir ialah mengurangi gangguan keraguan (*doubt*). Keraguan akan berhenti ketika keyakinan diperoleh. Keyakinan ini merupakan titik pemberhentian (*stopping place*) dari keraguan, tapi sekaligus titik memulai (*starting place*) tindakan.⁶ Berbeda dari Positivisme yang menolak sama sekali keyakinan hipotetis, Pragmatisme Peirce mengakui adanya keyakinan ini. Juga berbeda dari Positivisme yang mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan penjelasan yang murni teoritik, Pragmatisme Peirce bertujuan untuk tindakan tertentu.⁷

Konsekuensi pada tindakan bukan hanya kriteria uji gagasan bahkan semua gagasan kita mengenai sesuatu adalah gagasan tentang efek praktikal-nya. “Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we

⁵ Vincent M. Colapietro, “Charles Sanders Peirce” dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 23.

⁶ Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”..., 6

⁷ Charles Sanders Peirce, “What Pragmatism is?” dalam *The Monist* (vol 15, no 2), April 1905, 423.

conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.”⁸

b. William James : Teori Kebenaran

“The Pragmatic Method is primarily a method of settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable”⁹

Metode Pragmatik, bagi James, ialah metode untuk mengakhiri perdebatan metafisik yang tak berkesudahan. Setiap gagasan berusaha diinterpretasi dengan melacak konsekuensi praktikal masing-masing. Pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi gagasan-gagasan ialah: apa perbedaan praktikal yang dapat dibuat oleh gagasan itu? Apabila tidak ada perbedaan yang bisa dilacak, maka artinya tidak ada perbedaan di antara gagasan-gagasan tersebut, dan dengan demikian semua perdebatan tidak diperlukan lagi.¹⁰

Kebenaran, dalam Pragmatisme William James, ialah kesesuaian dengan realitas. Kesesuaian yang dimaksud di sini ialah proses verifikasi ide dalam realitas. Sedang, realitas ialah segala sesuatu yang tidak hanya mencakup hal-hal yang bisa diindrai secara kasat mata tetapi juga relasi-relasi seperti jarak, intensitas, keramahan, dst.¹¹ Oleh karena kesesuaian merupakan sebuah proses verifikasi, maka kebenaran dalam Pragmatisme tidak bersifat stagnan. Bahkan, kebenaran *terjadi* pada sebuah ide. Lebih tepat untuk mengatakan *menjadi benar* atau *dibuat menjadi benar* karena peristiwa. Realitas dalam Pragmatisme bukan dilihat dalam unit-unit yang terpisah melainkan sebagai sesuatu yang mengalir dan tidak memiliki batas-batas yang sangat jelas sehingga hal-hal yang kita rasakan pun dapat diakui sebagai realitas.

⁸ Charles Sanders Peirce, “How to Make Our Ideas Clear”..., 8.

⁹ William James, “Pragmatism”, dalam “*Writings 1902-1910, Literary Classics of The United States*”, New York: 1987, 505

¹⁰ Ibid.

¹¹ William James, “Pragmatism”..., *Op. Cit.*, 576.

James menambahkan satu kriteria lagi pada kebenaran yaitu memenuhi fungsi kebergunaan untuk sebagai yang melengkapi fungsi kesesuaian dengan realitas. Kebenaran terjadi ketika dapat menuntun pada pengalaman yang memuaskan atau berguna.¹²

Pragmatisme, berdasarkan pendirian atas kebenaran yang demikian, memandang produk ilmiah sebagai hanya prediksi dari kita. Hukum dan teori ilmiah tidak ada yang secara absolut menjadi transkrip dari realitas. Setiap peneliti melihat dari beberapa sudut pandang yang berguna. Teori hanya merupakan bahasa buatan manusia untuk membantu analisis dan prediksi.¹³ Sebagai contoh: kita tidak harus berfikir secara harafiah bahwa eter, atom atau elektron itu benar-benar mewakili realitas. Model-model mikromolekular tersebut hanya cara untuk mengukur fenomena dengan mengubahnya menjadi formula yang lebih sederhana. Term-term tersebut berguna untuk mengukur fenomena dan menciptakan hal baru.

c. John Dewey: Metode Saintifik dan Persoalan Sosial Konkrit

“Method is...a mode of intelligent practice”

Harold Lasswell, seorang tokoh yang diakui sebagai perintis Kajian Kebijakan Publik, dalam karyanya yang berjudul “Policy Orientations” (1951) menyarankan secara eksplisit untuk melibatkan karya John Dewey dan tokoh-tokoh filsuf pragmatisme Amerika lain.¹⁴ Pragmatisme bagi John Dewey bukan hanya bagian dari metode dalam memperoleh pengetahuan tentang konsekuensi yang berupa tindakan atau bagaimana dunia bekerja, tetapi juga pandangan hidup untuk menggunakan intelegensi untuk kemanusiaan yang lebih baik.¹⁵

Dalam *Logic: The Theory of Inquiry*, Dewey menolak ilmu pengetahuan yang semata-mata hanya mencari objektivitas. Hal ini karena, bagi Dewey, bahasa observasi yang netral itu tidak mungkin dicapai. Dewey membebaskan metode saintifik yang melulu berorientasi pada objektivitas sehingga

¹²*Ibid.*, 575.

¹³ *Ibid.*, 510.

¹⁴ Timothy V. Kaufman Osborn, *Op.Cit.*, 828.

¹⁵ Philip W. Jackson, “*John Dewey*” dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006, 60.

memungkinkan peneliti untuk memasuki ranah di bawah penampakan realitas dan menangkap sifat-sifat dasar dari realitas sosial atau fisik dalam term masing-masing kajian. Dewey melampaui jurang ontologis antara subjektif dan objektif. Dewey menolak pandangan bahwa ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengonstruksi representasi yang mencerminkan realitas. Tidak seperti positivisme yang mengunggulkan netralitas saintifik dan mengasumsikan ada sesuatu yang disebut absolut, komitmen pada epistemologi kontekstual membuat Dewey berpendapat bahwa semua ilmu merupakan tanggapan adaptif atas persoalan dalam lingkungan spasiotemporal konkrit tertentu. Komitmen Dewey ini memiliki konsekuensi terhadap ilmu sosial (dan kemudian juga pada kajian kebijakan publik) yaitu (1) dalam ilmu sosial, peneliti yang mencari pengetahuan tentang proses kultural ialah produk sekaligus kontributor dari kultur tersebut; (2) penelitian ilmu sosial harus mencari akar atas persepsi dalam persoalan kehidupan publik; (3) nilai dari penelitian ilmu sosial terletak pada kemampuannya untuk membentuk solusi hipotetis, yang ketika dilakukan, dapat menyelesaikan kesulitan yang pada mulanya memantik kemunculan penelitian.¹⁶ Pijakan Pragmatisme, dengan demikian, ada pada ilmu pengetahuan tetapi juga kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa filsafat pragmatik harus mengembangkan gagasan yang relevan dengan krisis aktual dalam kehidupan.¹⁷

Metode saintifik, bagi Dewey, bukan sebagai cara bagi peneliti untuk memahami objek sebagaimana adanya, tetapi sebagai sistem operasi eksperimental yang saling berhubungan yang memungkinkan perubahan konkret situasi yang tak tentu. Metode saintifik merupakan mode dari intelegensi praktis. Metode merupakan suatu ketrampilan rekayasa/manipulasi yang memberi kekuatan pada pemiliknya untuk membentuk pengalaman problematis ke dalam 'kesatuan situasi eksistensial' (unified existensial situation).¹⁸ Dengan kata lain, metode memungkinkan peneliti untuk mengubah/ mentransformasi, membentuk, mengatur/mengorganisasi pengalaman-pengalaman yang penuh persoalan ke dalam bentuk tertentu yang dikehendaki.

¹⁶ Timothy V. Kaufman Osborn, *Op.Cit*, 829-830

¹⁷ Philip W. Jackson, "John Dewey"..., 60

¹⁸ Timothy V. Kaufman Osborn, 830

Pengaruh Dewey-an pada ilmu sosial ialah pembuktian nilai epistemis melalui demonstrasi kemampuan ilmu tersebut untuk mengubah dunia sosial dengan cara tertentu yang dimaksudkan manusia. Kontrol instrumental atas dunia bukan saja tujuan dari ilmu pengetahuan dan juga bukan hanya bukti untuk menguji pemahaman kita tentang dunia, melainkan, secara lebih mendasar lagi, merupakan keseluruhan pengetahuan kita. Bekerjanya suatu gagasan merupakan kebenaran, bukti untuk pengujian dan juga sekaligus pengetahuan kita tentang gagasan tersebut.¹⁹

2. Implikasi Pragmatisme pada Politik

Berikut akan dibahas implikasi-implikasi Pragmatisme dalam dunia politik baik secara teoritik maupun praktik (diambil dari pemikiran John Dewey):

- (a) Teori politik harus berangkat dari arena interaksi sosial. Dalam interaksi sosial dikenal dua ranah yaitu ranah privat dan publik. Publik secara sederhana diartikan sebagai yang melampaui ikatan-ikatan privat. Politik dimengerti sebagai usaha masyarakat untuk mengatur konsekuensi interaksi dalam ranah publik. Kehidupan politik itu mungkin ketika ada yang disebut fakta publik yaitu elemen dari jaring kesaling-tergantungan yang dapat diamati oleh setiap orang sehingga dapat menjadi objek dari kontrol kolektif.²⁰
- (b) Negara dibentuk oleh orang-orang yang terdampak konsekuensi publik ini dan mempertimbangkan untuk mengatur konsekuensi tersebut secara sistematis. Konsepsi negara yang demikian menjustifikasi demokrasi elektoral dan institusi politik representatif sebagai alat bagi seluruh penduduk untuk memilih orang yang kompeten guna mengurus konsekuensi publik. Penduduk memberi kepada para petugas ini otoritas tindakan yang di dalamnya mereka merumuskan rencana cerdas untuk memenuhi kebutuhan konstituen.²¹

¹⁹ Timothy V. Kaufman Osborn, 831

²⁰ Timothy V. Kaufman Osborn, 831

²¹ Ibid., 832

- (c) Sains sosial adalah bagaian penting dan tak terpisahkan dari praktik politik. Baik sains sosial maupun praktik politik merupakan ‘seni perencanaan’ yang mendefinisikan rencana sebagai gagasan yang memberikan relasi hipotetis pada apa yang belum terjadi dan digunakan sebagai panduan untuk bertindak. Dalam ‘seni perencanaan’ yang disusun berdasarkan rasionalitas kehidupan politik dibutuhkan pengetahuan yang memungkinkan perubahan keadaan persoalan sosial. Perencanaan sosial yang melibatkan rasionalitas ini menjadi objek dari kebijakan publik.²²
- (d) Untuk menghadirkan ilmu sosial pragmatic sebagai sumber dari rencana terapeutik/ penyembuhan atas praktik sosial yang mengalami persoalan, Dewey mengasumsikan penerimaan atas penelitian saintifik yang dapat menghasilkan standard kritis untuk mengukur ‘yang berharga’ dalam kultur demokratis. Dewey juga menjustifikasi reformasi keyakinan dan praktek-praktek kebiasaan yang menghalangi kemajuan rencana negara.²³
- (e) Dibutuhkan orang yang kompeten untuk mengatur konsekuensi kesaling-tergantungan dalam ranah publik, yaitu pemrakarsa/perekayasa sosial (sosial engineering). Tidak ada yang lebih rasional bagi public demokratik, selain memilih pemrakarsa yang demikian daripada memilih orang biasa yang tak terlatih untuk memutuskan desain terbaik dan kebijakan publik bagi penduduk.
- (f) Lalu bagaimana verifikasi keputusan-keputusan saintifik sosial yang punya implikasi pada kehidupan politik dilakukan? Apa kriterianya? Siapa yang berhak menentukan benar dan salah? Dalam pemikiran John Dewey, ‘benar’ bukan hanya bila penelitian dapat memahami yang ‘nyata’ dari situasi persoalan tertentu. Kriteria verifikasi kebenaran dapat dilacak dari teori logika Dewey. Teori logika ini menyesuaikan standar verifikasi dengan praktik historis sosial.

²² Ibid.

²³ Timothy V. Kaufman Osborn, 835-836

Logika Dewey ini menolak pandangan bahwa norma-norma saintifik merupakan norma yang abadi, a priori, dan di luar praktik. Sebaliknya, teori logika Dewey menyarankan sumber dan verifikasi kebenaran yang diletakkan dalam akumulasi fakat keberhasilan-keberhasilan penyelesaian persoalan. Dengan kata lain, standar dari verifikasi selalu diperbarui dari waktu ke waktu sesuai praktik sosial dan sebagai hasil dari proses koreksi-diri (*self-corrective process*).

- (g) Namun demikian, klaim kebenaran tidak mungkin divalidasi tanpa merujuk pada kesepakatan dari masyarakat untuk menerima prosedur tertentu sebagai sarana yang paling masuk akal untuk menilai kebijakan yang dihasilkan para pembuat kebijakan publik. Namun, siapa yang menentukan usaha rekonstruksi sosial tertentu berhasil? Dalam tesis perekayasa sosial (*social engineering*) yang bertugas ialah mereka yang telah mendapat pendidikan tentang kebijakan publik dan metode dari ilmu-ilmu sosial tertentu.²⁴

3. Kontribusi Pragmatisme pada Kebijakan Publik

Berdasarkan asumsi-asumsi epistemologis Pragmatisme berikut diuraikan kontribusi Pragmatisme dalam tiga tahap dalam analisis kebijakan publik:

- 1) Analisis Persoalan
 - a) Kebijakan Publik, dalam Pragmatisme, merupakan suatu perencanaan atau desain rasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati masyarakat. Tujuan bersama ini ialah apa yang dianggap berharga atau berguna bagi masyarakat. Ini sejalan dengan kriteria kebenaran menurut William James yaitu bukan hanya kesesuaian dengan realitas, tetapi juga memiliki fungsi kebergunaan. Sebelum kebijakan publik diputuskan diperlukan analisis tentang hal apa yang paling berguna untuk masyarakat. Analisis ini dilakukan

²⁴ Ibid., 837

dengan pengumpulan fakta-fakta mengenai persoalan sosial yang ingin diselesaikan.

- b) Dalam pemikiran Dewey, mengenai masyarakat demokratis, kebijakan publik setidaknya disusun untuk membantu mengoptimalkan tiga prasyarat kewargaan demokratik yaitu: (1) otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil tindakan independen; (2) hubungan resiprokal yaitu kesediaan untuk berbagi dan (3) pembelajaran yaitu kemampuan untuk menguji dan mengubah pilihan. Tiga prasyarat ini juga digunakan untuk mengevaluasi persoalan mana yang layak diangkat.

2) Analisis Keputusan

- a) Analisis keputusan dilakukan oleh pembuat keputusan yang dianggap kompeten (tesis *social engineering*). Ini dianggap sebagai jalan yang paling efektif, rasional dan membawa pada kebergunaan dibanding cara lain.
- b) Apabila ada alternatif keputusan maka analisis didasarkan atas analisis problem. Dipertimbangkan mana cara yang paling efektif dan membawa pada kebergunaan? Orientasi pada problem merupakan warisan dari pragmatisme.
- c) Kebijakan publik ditunjukkan untuk konsekuensi praktis yaitu mengubah tindakan tertentu. Kebenaran dalam pragmatisme bukan hanya kebenaran stagnan, tetapi dinamis, maksudnya adalah kebenaran bukan hanya soal mencocokkan dengan realitas (stagnan) tetapi mengubah tindakan (dinamis). Suatu ide menjadi benar karena suatu peristiwa. Tolok ukur kebijakan publik ialah apa perbedaan konsekuensi praktikal yang dibuat dengan kebijakan publik tersebut? Perilaku apa yang ingin diubah? Bagaimana mekanisme paling efektif yang dapat ditempuh? Sebagai contoh, untuk mengurangi korupsi dilakukan aturan e-budgeding, sehingga kontrol publik menjadi lebih efektif, dan perilaku korupsi bisa dirubah.

- d) Terutama setelah Perang Dunia II, Kebijakan publik dimengerti sebagai rancangan yang melibatkan rasionalitas. Kebijakan publik dalam konteks ini memiliki tujuan yang rasional, terukur dan berorientasi pada konsekuensi di masa depan. Pragmatisme menekankan perhitungan yang cermat akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Seberapa efektif kebijakan public tersebut menyelesaikan persoalan? Seberapa banyak orang yang merasakan kebermanfaatannya dari kebijakan tersebut?
 - e) Perencanaan sosial/kebijakan publik ini dalam Pragmatisme juga ditunjukkan sebagai alat untuk mendorong warga negara “berpartisipasi”. Sebagai contoh, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan publik, tidak disarankan kurikulum seragam yang standar, melainkan misalnya, mendorong orang tua untuk menyatakan kepuasan dan ketidakpuasan terhadap fasilitas publik dengan memberi insentif ekonomi yang lebih tinggi untuk fasilitas yang lebih bagus. Kebijakan ini ditunjukkan untuk mendorong orang tua menilai manfaat sekolah bagi anak-anak mereka dan kemudian dapat memilih tempat mereka menyekolahkan anak-anaknya. Usulan dalam pendidikan, bukan bertujuan untuk meningkatkan kurangnya akses pendidikan dan menempatkan orang tua sebagai konsumen atas jasa pendidikan; tetapi lebih memungkinkan mereka untuk menyatakan pilihan pribadi mereka lebih efektif yang diungkapkan melalui insentif ekonomi.²⁵ Kebijakan yang demikian misalnya juga kita rasakan untuk jasa pengiriman surat/paket. Pengiriman paket yang lebih cepat harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi.
- 3) Analisis Implementasi
- a) Kriteria dari evaluasi kebijakan ialah efektivitas yang dimaknai sebagai keberhasilan dalam mengatasi persoalan sosial. Namun demikian, kriteria efektivitas seringkali tidak memperhatikan apakah

²⁵ Timothy V. Kaufman Osborn,... 847.

pemecahan tersebut sungguh-sungguh benar dan diarahkan pada kebaikan bersama? Sebagai contoh, apakah penyelesaian kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung tunai itu sungguh-sungguh benar atau hanya sekedar efektif? Apakah membangun bandara baru dengan pengusuran secara sepihak itu sungguh untuk kebaikan bersama atau sekedar efektif?

- b) Kriteria kebenaran dalam Pragmatisme yang tidak pernah absolut mengizinkan evaluasi terus-menerus atas kebijakan publik yang didasarkan atas reformasi keyakinan dan praktek-praktek kebiasaan yang menghalangi kemajuan. Sebagaimana dalam Dewey, kebijakan publik merupakan produk dari tindakan manusia yang bertujuan sebagai respon atas tantangan dari lingkungan.

4. Kritik terhadap penerapan Pragmatisme pada Kebijakan Publik

- a) Pembacaan atas kebutuhan masyarakat dalam Pragmatisme kerap kali bias dan sangat mungkin menghadirkan representasi yang manipulatif. Hal ini karena, menurut Aaron Wildavsky dalam *Speaking Truth to Power*, generasi yang menjadi partisipan kebijakan publik diatur oleh rasionalitas pasar yang mendikte definisi-definisi mereka tentang apa itu tujuan bersama, berbagi, pembelajaran, perubahan, hubungan resiprokal, dll. Misal, hubungan resiprokal yang dimengerti sebagai kesediaan untuk berbagi, oleh rasionalitas pasar dimengerti sebagai hubungan yang utamanya didasarkan atas kepentingan-diri dan keinginan-diri. Ini sebenarnya bertentangan dengan gagasan Dewey. Bagi Dewey, yang dibutuhkan ialah penyatuan kepentingan-kepentingan individual secara lebih efektif melalui institusi publik melalui pembentukan pemahaman bersama mengenai kebaikan bersama (*common good*).²⁶
- b) Dewey mengasumsikan bahwa masyarakat mampu untuk mengambil tindakan politik sehingga bisa mengatasi kesalahan dalam sistem

²⁶ Timothy V. Kaufman Osborn, ... 846

yang bukan sekedar menghasilkan kebijakan yang berhasil tetapi yang sungguh-sungguh benar. Pada kenyataannya, orientasi-problem pada kebijakan yang efektif hanya bermakna penyelesaian persoalan secara sesaat dan parsial daripada sungguh-sungguh melayani publik demi kebaikan bersama (*common good*).

- c) Kebenaran dalam pemikiran Pragmatisme, khususnya Dewey, bukan cenderung dalam arti logika atau epistemologis tapi lebih sebagai pemecah persoalan sosial. Padahal, benar tidak sama dengan berdaya-guna mengatasi persoalan. Tidak semua yang dapat mengatasi persoalan sama dengan benar dan hanya sebagian dari yang benar yang dapat (langsung) mengatasi persoalan.
- d) Pandangan yang monolitik tentang apa yang berharga atau berguna. Pragmatisme mengandaikan persepsi orang tentang apa yang berguna dapat diseragamkan atau setidaknya bisa berjalan beriringan. Faktanya, dalam masyarakat kontemporer, institusi publik tidak mungkin untuk menyeragamkan apa yang berguna menurut setiap orang. Berhadapan dengan berbagai tujuan politis dalam masyarakat ini, Pragmatisme tidak memiliki kriteria yang jelas untuk praktik memilih tujuan politis yang mana yang hendak dicapai. Di sini Pragmatisme tak lebih dari pemikiran yang umum, normatif dan populer tentang metode saintifik. Bahkan, Pragmatisme diam-diam menyetujui untuk menjadi pelayan atas tujuan apa saja sesuai dengan kepentingan yang menggunakannya.²⁷
- e) Produk dari Kebijakan Publik seringkali digunakan sebagai sarana yang efektif untuk meraih kekuasaan dalam politik praktis. Misal: kebijakan anti-imigran Donald Trump, merupakan kebijakan yang disukai oleh banyak warga, sehingga menaikkan elektabilitas Trump. Namun demikian, kebijakan ini tidak berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan Kebaikan umum. Contoh lain: Revisi UU tentang penindakan korupsi yang menguntungkan para pejabat publik yang

²⁷ Timothy V. Kaufman Osborn,... 832.

korup, UU agraria setelah Orde Baru yang membuka investasi asing demi keamanan kekuasaan rezim tersebut.

- f) Kelemahan dari tesis perekayasa sosial dalam Pragmatisme ialah, kebijakan yang dibuat oleh para ahli kebal terhadap serangan publik yang dianggap tidak memiliki kecakapan untuk menilai. Hal ini justru bertentangan dengan semangat pragmatisme untuk selalu merevaluasi kebijakan publik agar sesuai dengan kebutuhan sosial.
- g) Pragmatisme yang digunakan oleh para ahli rekayasa sosial seringkali tujuannya bukan ditentukan oleh publik tetapi oleh aparatus negara yang dapat menerapkan teknik ini secara memadai untuk mencapai tujuan tertentu. Persekutuan antara pragmatisme dengan negara misalnya terjadi dalam mobilisasi militer untuk tujuan-tujuan yang tidak pernah secara jelas didefinisikan secara demokratis.²⁸
- h) Kelemahan dari pemikiran yang menekankan konsekuensi seperti pragmatisme dan utilitarianisme ialah konsekuensi ke depan seringkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Hal yang tidak kita anggap berdaya-guna di satu hari, barangkali akan sangat bermakna di kemudian hari. Sebagai contoh, developmentalisme yang menjadi kerangka utama dalam pembuatan kebijakan publik. Negara-negara berkembang dianggap harus digiring ke industrialisasi agar dapat mengejar ketertinggalan/dikatakan maju. Di kemudian hari, baru disadari developmentalisme membawa dampak buruk yang besar bagi kelangsungan kelestarian lingkungan dan menjadi manusia melulu sebagai sarana kemajuan industrial.
- i) Pragmatisme dalam kebijakan publik seringkali mengorbankan manusia lain sebagai sarana untuk pencapaian konsekuensi praktikal atau kegunaan. Kelompok orang miskin dan tersingkir sering menjadi korban atas penerapan kebijakan publik yang mengatasnamakan kegunaan untuk kepentingan bersama, misalnya, penggusuran sepihak

²⁸ Timothy V. Kaufman Osborn, ...833

untuk estetika kota, larangan menjadi pegawai untuk LGBT dengan alasan mereka membawa dampak buruk bagi masyarakat, dll.

Kesimpulan

Kontribusi Pragmatisme pada ilmu sosial telah mendorong lahirnya ilmu/kajian atas kebijakan publik. Ilmu kebijakan (*Policy Science*) dilihat sebagai realisasi dari konsep-konsep dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memecahkan persoalan sosial konkrit. Orientasi-pada-persoalan, fleksibilitas metode dan tujuan, verifikasi berdasar fakta, otoritas keputusan pada perekayasa sosial, perubahan pada tindakan, merupakan sifat-sifat dari kebijakan publik yang diinspirasi dari gagasan-gagasan epistemologi pragmatisme. Namun, sebagai konsekuensi logis dari diabsolutkannya konsekuensi praktis dan kegunaan, pragmatisme alih-alih membawa pada kebaikan umum justru menggiring pada situasi dehumanisasi yaitu penindasan terhadap manusia lain, manusia sebagai sarana untuk mencapai kepentingan penumpukan modal, atau sarana untuk mencapai kepentingan segelintir golongan, dll. Ini terjadi karena pragmatisme bisa menjadi pelayan dari tujuan apa pun, tanpa pernah mempersoalkan siapa yang menjadi tuan dari metode pragmatisme ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Colapietro, Vincent M., "Charles Sanders Peirce" dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006.
- Peirce, Charles Sanders, "How to Make Our Ideas Clear", dalam *Popular Science Monthly*, 12 January 1878, digital version, 1.
- Peirce, Charles Sanders "What Pragmatism is?" dalam *The Monist* (vol 15, no 2), April 1905, 412 (digital version).

Anastasia Jessica Adinda S—*Menyingkap Asumsi Pragmatisme di Balik Kebijakan Publik*

Jackson, Philip W., “*John Dewey*” dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds.), Blackwell Publishing, USA: 2006.

James, William “*Pragmatism*”, dalam “*Writings 1902-1910, Literary Classics of The United States*”, New York: 1987.

Osborn, Timothy V. Kaufman, “Pragmatism, Policy Science, and the State”, *American Journal of Political Science*, Vol. 29, No. 4 (Nov., 1985)